

Kontribusi Nyata Dinas Pekerjaan Umum Sumber Daya Air Dan Penataan Ruang (DPU SDA TARU) Provinsi Jawa Tengah dalam mendukung terselenggaranya urusan Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Periode 2013 s.d 2018 di Jawa Tengah

1. Program Pengembangan Dan Pengelolaan Jaringan Irigasi, Rawa Dan Jaringan Irigasi Lainnya.

Melalui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Tengah, kontribusi nyata pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi adalah meningkatnya Kondisi Jaringan Irigasi kewenangan Provinsi dari 72% di tahun 2013 menjadi 80% diakhir 2017 dan diharapkan menjadi 82% di tahun 2018 melalui kegiatan operasi, pemeliharaan dan perbaikan pada 108 Daerah Irigasi seluas 86.865 Ha. Dengan membaiknya kondisi jaringan irigasi tersebut telah meningkatkan luasan areal pertanian tanaman pangan dengan indeks pertanaman dari 250% menjadi 265% setahun yang berarti ada peningkatan produksi pertanian akibat penambahan areal tanam 15% setahun yang lebih jauh akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sebanyak 347.460 Kepala Keluarga (KK).

Melalui dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), telah pula dikembangkan Daerah Irigasi Teknis Baru seluas 8.200 Ha melalui pembangunan jaringan irigasi Protopiston (1.102 Ha.) dan Tingal (1.478 Ha.) di Kabupaten Temanggung, Jaringan Irigasi Cikawung (1.220 Ha.) di Kabupaten Cilacap dan jaringan irigasi Slinga Larangan (4.400 Ha.) di Kabupaten Purbalingga yang diharapkan dapat meningkatkan produksi padi dengan indeks pertanaman 300 % setahun yang lebih jauh akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani sebanyak 32.800 KK.

Selain dari pada itu, melalui dukungan dana APBN pula telah dilakukan Rehabilitasi Jaringan Irigasi kewenangan Pusat seluas 270.000 Ha untuk mengembalikan kondisi jaringan irigasi teknis seperti semula sehingga menjamin pasokan air irigasi lebih optimal pada Daerah Irigasi-Daerah Irigasi yang sumber airnya terjamin antara lain, Daerah Irigasi Sistem Waduk Kedung Ombo (59.544 Ha.) yang mengairi areal irigasi teknis di wilayah Grobogan, Pati, Kudus, Jepara dan Demak; Daerah Irigasi Colo (25.506 Ha.) di Kabupaten Sukoharjo, Klaten, Boyolali, Sragen dan Karanganyar; Daerah Irigasi Comal (9.075 Ha.) di Pemalang; Daerah Irigasi Pemali (26.952 Ha.) di Brebes; Daerah Irigasi Serayu (20.795 Ha.) di Banyumas dan Cilacap. Dengan telah dilakukannya perbaikan/rehabilitasi seluas 270.000 Ha. tersebut diharapkan akan menjamin pasokan air irigasi teknis pada

daerah-daerah lumbung pangan melalui perluasan tanam dengan indeks pertanaman hingga 275% setahun yang lebih jauh akan meningkatkan kesejahteraan petani sebanyak 1.080.000 KK.

Dengan demikian, melalui kontribusi nyata Pembangunan, Perbaikan dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi selama kurun waktu 2013-2018, areal irigasi teknis seluas 365.065 Ha yang menjadi kewangan Provinsi dan Pemerintah telah meningkatkan luasan areal tanam padi dan palawija dengan indeks pertanaman dari 250 % setahun pada akhir 2013 menjadi rata-rata 280 % setahun pada akhir 2018 yang lebih jauh akan meningkatkan produksi pangan sehingga meningkatkan pula kesejahteraan masyarakat petani sebanyak 1.460.260 KK

2. Program Penyediaan Dan Pengelolaan Air Baku

Meningkatkan pemenuhan kebutuhan air baku masyarakat Jawa Tengah dari 50,12% pada akhir 2013 menjadi 58,50% pada akhir tahun 2017 dan diharapkan akan mencapai 60,80% pada akhir 2018 yang akan datang melalaui operasi, pemeliharaan dan revitaliasi saluran air baku Klambu Kudu untuk memasok PDAM Kudu Kota Semarang 1.250 l/dt dan saluran sekunder Pesugihan untuk memasok PDAM Pesugihan Cilacap 500 l/dt serta pembangunan 81 buah embung yang tersebar di 20 Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dengan total volume tampungan \pm 2,3 juta m³. Embung yang telah dibangun oleh APBD Provinsi Jawa Tengah tersebut antara lain : Embung Bagelen Kab. Purworejo; Embung Danasri Lor, Embung Cikalong, Embung Bunter, Embung Liyunggunung Kab. Cilacap; Embung Bumiayu, Embung Sidokumpul Kab. Kendal; Embung Sridadi, Embung Warugunung, Embung Ronggomulyo (1), Embung Ronggomulyo (2) Kab. Rembang; Embung Slarang Lor, Embung Kertasari, Embung Bulakpacing, Embung Dukuhdamu Kab. Tegal; Embung Tegalrejo Kab. Grobogan; Embung Seboto Kab. Boyolali; Embung Siwuluh, Embung, Kedawon, Embung Karang Sari, Embung Rancawuluh Kab. Brebes; Embung Mesu, Embung Ngunduk Kab. Wonogiri; Embung Palumutan Kab. Purbalingga; Embung Gemecece Kab. Pati; Embung Mranggen, Embung Krilikan Kab. Klaten; Embung Cikeusal Kidul dan Embung Karang Sembung Kab. Brebes, Embung Purwojati Kab. Banyumas; Embung Doya Kab. Wonogiri; Embung Sembatur Agung Kab. Pati dan Longstorage Mukiran Kab. Semarang.

Pembangunan Embung selain untuk penyediaan air baku masyarakat, juga membantu masyarakat sekitar embung untuk mengembangkan budidaya pertanian tanaman pangan dan budidaya hortikultura yang bernilai ekonomi tinggi

antara lain buah naga, lengkeng itoh dan durian montong yang telah meningkatkan pendapatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat lebih kurang 11.500 KK.

Selain dari pada itu, peningkatan pemenuhan air baku masyarakat sebanyak 60,8 % pada akhir 2018 nanti juga didukung terlaksananya pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Regional yang merupakan kerja sama antara Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Jawa Tengah dimana 1 (satu) SPAM Regional Bergas untuk melayani PDAM Kabupaten Brebes, Kabupaten Tegal dan Kota Tegal sebesar 650 l/dt sudah beroperasi sedang 3 (tiga) SPAM Regional lainnya yaitu Keburejo untuk wilayah Kabupaten Kebumen dan Purworejo; SPAM Regional Petanglong untuk wilayah Kabupaten Pekalongan, Batang dan Kota Pekalongan serta SPAM Regional Wosusoka untuk wilayah Wonogiri, Sukoharjo, Solo dan Karang Anyar sedang berproses dan diharapkan pada akhir 2018 akan menambah pasokan air bersih sebesar 2.700 l/dt. Sedang 2 (dua) SPAM Regional Dadimuria untuk Wilayah Grobogan, Kudus dan Jepara dan SPAM Semarang Barat untuk Wilayah Kota Semarang bagian Barat akan dimulai tahun 2018 yang diharapkan akan menambah pasokan air bersih sebesar 1.505 l/dt.

Dengan demikian melalui pengelolaan jaringan air baku yang ada dan pengembangan infrastruktur air baku berupa embung dan SPAM Regional telah menambah jaminan pasokan air baku masyarakat sebesar 12.105 l/dt yang akan memenuhi kebutuhan air baku masyarakat Jawa Tengah 65 % dari total penduduk yang ada yaitu sebesar \pm 22.000.000 orang.

3. Program Pengembangan, Pengelolaan, dan Konservasi Sungai, Danau, dan Sumber Daya Air lainnya.

Meningkatnya persentase sungai dalam kondisi baik di Jawa Tengah dari kondisi 51,66% di akhir 2013 menjadi 52,06% di akhir 2017 serta diharapkan menjadi 52,16% di akhir 2018 melalui kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan sarana konservasi dan Operasi & Pemeliharaan Sarpras konservasi

Sampai dengan Tahun Anggaran 2018 telah dibangun prasarana konservasi berupa check dam/groundsill sebanyak 13 buah, pelindung/perkuatan tebing 40 lokasi, sumur resapan, biopori, sed drain pond sebanyak 28 lokasi yang tersebar di 43 DAS/sungai di 28 Kab./Kota se Jateng. Sedangkan pembangunan prasarana konservasi antara lain meliputi pembangunan groundsill di DAS Brungut Kab.

Tegal, DAS Blukar Kab. Kendal, , DAS Pemali Kab. Tegal, Sub DAS kupang Kab. Pekalongan, DAS Bodri Kab. Kendal, DAS Cacaban Kab. Tegal, Sub DAS Keruh Kab. Brebes, Sub DAS Genteng Kab. Pekalongan, Sub DAS Rambatan Kab. Brebes, Konservasi Rawa Pening Kab. Semarang, DAS Damar Kab. Kendal Sub DAS Tajum Kab. Banyumas, Sub DAS Galeh Kab. Temanggung dan Sub DAS Mrawu Kab. Banjarnegara, guna stabilisasi dasar sungai, mencegah gerusan tebing sungai, mencegah longsornya tebing sungai yang mengancam kawasan pertanian, permukiman, fasilitas umum masyarakat.

Dalam implementasinya membangun groundsill, sumur resapan, biopori dan sedrainpond selalu dilakukan dengan pelibatan masyarakat setempat dengan dikombinasikan dengan kegiatan Gerakan Nasional Kemitraan Penyelamatan Air (GNKPA) serta pemberdayaan masyarakat melalui gerakan restorasi Sungai yang dipelopori oleh kelompok penggiat pencinta lingkungan hidup.

Mulai 2013 sampai dengan 2018 Dinas PU SDA TARU provinsi Jawa Tengah telah memfasilitasi serta ikut sharing terwujudnya pembangunan bendungan besar yang merupakan Program Strategis Nasional (PSN) sebagai berikut :

- a. Bendungan Kuningan di Kabupaten Kuningan Provinsi Jawa Barat, secara fisik Bendungan dan Waduk Kuningan berada di Jawa Barat namun manfaatnya menjamin ketersediaan air irigasi sistem DI. Cijengkelok di Kab. Brebes.
- b. Bendungan Gondang di Kabupaten Karanganyar
- c. Bendungan Logung di Kabupaten Kudus
- d. Bendungan Pidekso di Kabupaten Wonogiri

Rencana 2 (dua) Bendungan lagi akan dimulai pada Tahun Anggaran 2018 yaitu pembangunan bendungan Jlantah Kabupaten Karanganyar dan Bendungan Randugunting di Kabupaten Blora.

Disamping itu sedang dalam tahap pengusulan untuk proses Multi Year Contract (MYC) adalah Bendungan Bener Kabupaten Purworejo, Bendungan Dolok di Kabupaten Demak dan Bendungan Jragung di Kabupaten Semarang.

Dari ke 9 (sembilan) bendungan tersebut merupakan bagian 65 (enam puluh lima) buah bendungan yang akan dan sedang dibangun oleh Pemerintahan Jokowi-JK guna mendukung terwujudnya kedaulatan pangan melalui ketahan air yang mantap dengan menambah cadangan air yang akan ditampung pada 50 buah bendungan setara 2,5 Milyar m³ sehingga menjamin pasokan areal irigasi teknis seluas 320.000 Ha. (35% dari total areal sawah teknis di Jateng), air baku

bagi masyarakat Jawa Tengah, pengendalian banjir dan pembangkit Listrik Tenaga Air (PLTA) 309,75 MW

4. Program Pengendalian Banjir Dan Pengamanan Pantai

Kontribusi nyata program pengendalian banjir dan pengamanan pantai ini adalah menurunnya luasan daerah genangan banjir dari 167.000 Ha. di akhir 2013 menjadi 147.000 Ha. di akhir 2017 serta diharapkan menjadi 142.000 Ha. di akhir 2018 melalui Perbaikan dan Pembangunan Sarana Prasarana Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai dan Operasi & Pemeliharaan Sarpras Pengendali Banjir.

Kegiatan Perbaikan dan Pembangunan Pengendalian Banjir dan Pengamanan Pantai antara lain meliputi kegiatan perkuatan tebing S. Bodri, S. Kendal, S. Bulanan, S. Damar, S. Kuto, Plumbon, Pengamanan Pantai Sendang Sikucing Kab. Kendal, S. Blorong, S. Pecut, Kab. Kendal, S. Comal, S. Sengkarang Kab. Pekalongan, S. Rambut, S. Cacaban, Kab. Tegal, S. Layangan Kab. Pemalang, S. Glagah dan S. Pedes Kab. Brebes, S. Silandak untuk pengamanan Bandara A. Yani, Pengamanan Pantai Kota Pekalongan.

Kegiatan perbaikan dan pembangunan penengendali banjir dan pengamanan pantai memberi kontribusi dalam melindungi areal sentra produksi pangan, permukiman serta fasilitas umum dari kerusakan akibat daya rusak air.

Melalui kegiatan yang dibiayai APBN, kontribusi nyata Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah adalah sharing kegiatan sebelum konstruksi antara lain : studi, Detail Engineering Design (DED), Amdal, LARAP dan pembebasan lahan serta fasilitasi penyelesaian masalah-masalah sosial pada sistem sungai yang telah dilaksanakan secara sistemik antara lain adalah pengelolaan banjir sistem kali Garang atau Kanal Banjir Barat (KBB) dan sistem Semarang bagian tengah yaitu antara KBB dan KBT dengan 2 (dua) buah polder terbangun yaitu Polder Semarang dan Polder Banger.

Sedangkan rehabilitasi dan revitalisasi sistem sungai yang saat ini sedang berjalan adalah sistem KBT, Sistem S. Tenggang dan Sistem Sungai Sringin di Kota Semarang, sistem sungai Cabean, Jragung, KB1 dan KB15 Kab. Grobogan dan Kab. Demak. Sedangkan di wilayah selatan meliputi perbaikan sistem sungai Bogowonto, Jali, Gebang di Kabupaten Purworejo, Wawar, Cokroyasan, Ijo & Tipar di Kabupaten Kebumen dan Banyumas.

Pada Akhir Tahun Anggaran 2017 tepatnya pada tanggal 14 Desember 2017 telah ditanda tangani kontrak pekerjaan Pengendalian Banjir & Rob Kab. Pekalongan Paket 1 & Paket 2 sedangkan pada tanggal 15 Desember 2017 juga telah ditanda

tangani kontrak paket pekerjaan Pengendalian Banjir & Rob Kota Pekalongan Paket 3. Rencana Trase Tanggul Pengendalian Banjir & Rob meliputi Desa Boyotelu, Kec. Siwalan, Desa Semit, Desa Trtebang, Desa Wonokerto, Desa Api-api, Desa Pecakaran, Kec. Wonokerto, Desa Mulyorejo, Desa Jeruksari, Kec. Tirta Kabupaten Pekalongan & Kelurahan Bandengan, Kelurahan Kandang Panjang, Kec. Pekalongan Utara Kota Pekalongan.

Ground Breaking Pekerjaan Pengendalian Banjir pada Kanal Banjir Timur (KBT) Kota Semarang juga telah dilaksanakan dengan kontrak tahun jamak 2017-2019.

Rencana integrasi Tol Semarang-Demak dengan tanggul laut juga masuk dalam agenda besar dalam upaya mengurangi ancaman banjir dan rob di wilayah Genuk Kota Semarang-Sriwulan sampai dengan muara sungai Sayung Kabupaten Demak yang akan dilaksanakan pada Tahun 2018 dimana Dinas PU SDA TARU Provinsi Jawa Tengah mendapat tugas menyelesaikan kesesuaian Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Jawa Tengah , RTRW Kota Semarang dan RTRW Kab. Demak.

5. Program Perencanaan Tata Ruang

Program ini memiliki 2 indikator kinerja program, yaitu Persentase Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang memiliki rencana tata ruang dan Persentase Kabupaten/Kota yang terfasilitasi Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Dampak dari program ini adalah untuk mewujudkan Rencana Tata Ruang kawasan strategis provinsi serta meningkatkan kualitas rencana tata ruang kabupaten/kota yang menjadi dasar/pedoman dalam melaksanakan pembangunan.

Sampai dengan tahun 2017 telah dilakukan :

1. Penyusunan 16 (enam belas) dokumen Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi (KSP), penyesuaian terhadap 2 RTR KSP dan penetapan 1 (satu) Peraturan Daerah Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Provinsi Kawasan Perkotaan Brebes-Tegal-Slawi-Pemalang.
2. Telah dilakukan pembinaan berupa pembahasan terhadap 62 (enam puluh dua) Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah untuk mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN. Dari 62 RDTR tersebut baru 1 RDTR yaitu RDTR Kota Salatiga yang sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi.

3. Pada tahun 2017, sedang dilakukan proses revisi terhadap RTRW Provinsi Jawa Tengah dan dengan adanya dinamika serta perubahan kebijakan yang terjadi terutama dengan adanya revisi RTRW Provinsi maka Kabupaten/Kota mulai melakukan review terhadap RTRWnya.
4. Telah dilaksanakan pembahasan terhadap 12 (dua belas) revisi RTRW Kabupaten/Kota dan 1 (satu) evaluasi RDTR yaitu RDTR Kota Salatiga.
 - a. Dari 12 revisi RTRW Kabupaten/Kota tersebut, terdapat 1 kabupaten yang sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur yaitu Kabupaten Sukoharjo
 - b. Terdapat 1 (satu) Kabupaten yang sudah mendapatkan Rekomendasi Gubernur dan Persetujuan Substansi dari Menteri ATR/BPN yaitu Kabupaten Pemalang.
 - c. 10 Kabupaten/Kota yang lain sudah dibahas pada tingkat BKPRD Provinsi Jawa Tengah.
5. Kegiatan Penyusunan Sistem Informasi Penataan Ruang dengan hasil tersusunnya sistem informasi penataan ruang dan pengembangannya serta terlaksananya pembinaan penataan ruang terhadap 35 Kabupaten/ Kota. Beberapa kendala terkait proses revisi RTRW maupun penyusunan RDTR yaitu proses konsultasi untuk mendapatkan surat kelayakan dokumen sebagai salah satu syarat dalam pengajuan Persetujuan Substansi kepada Menteri ATR/BPN dan Rekomendasi Peta dari BIG. Kedua proses tersebut memerlukan waktu yang relatif lama.

6. Program Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Indikator kinerja program berupa Persentase Kesesuaian Pemanfaatan Ruang dengan Rencana Tata Ruang.

Hal yang telah dilakukan adalah :

1. Melakukan pengawasan penataan ruang dengan memantau dan mengevaluasi tingkat kesesuaian pemanfaatan ruang dengan rencana tata ruang dengan hasil sebesar 68,725 % tingkat kesesuaian. Proses pengawasan ini dengan melihat kesesuaian Pola Ruang, Struktur Ruang dan Indikasi Program yang ada di Rencana Tata Ruang Wilayah dengan kondisi eksisting di lapangan.
2. Pelaksanaan pengawasan khusus (Wasus) terhadap permasalahan pemanfaatan ruang dengan output memunculkan rekomendasi teknis pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang. Pada tahun 2016 sebanyak 10 (sepuluh) permasalahan dan pada tahun 2017 sebanyak 4 (empat) permasalahan.

3. Kegiatan Pembinaan Pengendalian Pemanfaatan Ruang dengan hasil terlaksananya kegiatan Pokja Pemanfaatan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang BKPRD, terlaksananya kegiatan pembinaan terhadap aparatur kabupaten/kota dan masyarakat, terlaksananya penyusunan pedoman pengendalian pemanfaatan ruang.
4. Kegiatan Pengawasan Penyelenggaraan Penataan Ruang dengan hasil terlaksananya pengawasan teknis (Wastek) ke 35 Kabupaten/ Kota dengan menilai kinerja dari aspek pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.

Dampak dari program ini adalah untuk meningkatkan pemahaman stakeholders pembangunan terhadap Penataan Ruang, meningkatkan upaya sinkronisasi program pembangunan dengan Rencana Tata Ruang serta mengendalikan pelaksanaan pembangunan agar sesuai dengan Rencana Tata Ruang.